

ABSTRAK

Syaiful Annas. NIM. 21.0311.020086. *Reformulasi Hukum bagi Disparitas Putusan Perceraian Peradilan Agama Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak*, di bawah bimbingan (1) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzy, M.Hum. dan (2) Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., Disertasi, pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: *Konversi Agama, Disparitas, Reformulasi Hukum*

Sebagai perwujudan dari peradilan Islam, pengadilan agama merefleksikan hukum Islam (fikih) dalam putusan-putusannya dan menjadikannya sebagai acuan pertimbangan hukum. Perbedaan pendapat para ulama fikih mengenai penerapan mekanisme perceraian akibat konversi agama salah satu pihak berimplikasi pada perbedaan putusan pengadilan agama di Indonesia. Meskipun terdapat kesamaan substansi hukum, disparitas tersebut menunjukkan tidak adanya unifikasi hukum, yang berarti putusan-putusan tersebut tidak menjamin tercapainya tujuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum putusan pengadilan agama yang disparitas dan mengusulkan hukum yang lebih tepat untuk menerapkan mekanisme perceraian dalam kasus-kasus yang melibatkan konversi agama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan filosofis. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan agama. Bahan hukum sekunder berupa literatur (cetak dan elektronik). Bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum. Dengan metode analisis normatif kualitatif dan analisis isi (*content analysis*).

Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perceraian di pengadilan agama karena konversi agama salah satu pihak belum mencerminkan unifikasi atau kepastian hukum, yang berimplikasi pada disparitas putusan disebabkan empat hal: *pertama*, adanya disharmonisasi norma dalam KHI; *kedua*, minimnya informasi dalam buku petunjuk teknis bagi aparat peradilan agama (buku II); *ketiga*, ketidaksepemahaman dengan putusan yang lebih tinggi; dan *keempat*, perbedaan hakim dalam menggunakan referensi hukum (fikih).

Dalam menerapkan mekanisme perceraian, peradilan agama di Indonesia harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan reformulasi hukum terhadap disparitas putusan perceraian peradilan agama akibat konversi agama salah satu pihak yang berbasis unifikasi dan kepastian hukum yang sesuai *validitas filosofis*, yang menekankan pada pentingnya perkawinan satu agama (akidah) demi terwujudnya tujuan dari sebuah perkawinan sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an, Hadits dan pendapat mayoritas ulama, sebab agama merupakan suatu hal yang prinsip. Dengan perbedaan agama menjadikan rusaknya perkawinan tersebut dan negara hadir melalui representasi putusan peradilan agama; *validitas yuridis*, yang menunjukkan bagaimana hukum di Indonesia menentukan sahnya perkawinan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga ketentuan tersebut secara substansi

mengatur larangan perkawinan beda agama, hal ini juga sinergis dengan hukum perkawinan Islam mensyaratkan adanya kesamaan agama. Dengan perbedaan agama akibat konversi agama salah satu pihak menjadikan rusaknya ikatan perkawinan tersebut; *validitas sosiologis*, negara menghendaki adanya stabilitas kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan individu, sosial, maupun bernegara melalui hubungan perkawinan seagama, karena sejatinya tidak ada agama yang membolehkan perkawinan beda agama; dan terakhir *validitas ubudiah*, di mana prinsip pelaksanaan perkawinan seagama menjadi bentuk ibadah dan ketaatan terhadap ajaran agama, sebab dalam perkawinan mengandung unsur pahala dan dosa, karena akad dalam perkawinan merupakan akad keagamaan (*aqdun diniyyun*), oleh karenanya perkawinan menjadikan kehalalan suatu yang sebelumnya haram. Oleh karena itu, dengan berdasarkan beberapa validitas yang telah disebutkan, sehingga untuk menjamin kepastian hukum maka ketentuan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam harus direvisi, dan reformulasi hukum yang lebih tepat dengan berbasis unifikasi dan kepastian hukum dalam penerapan mekanisme perceraian akibat konversi agama salah satu pihak bagi putusan peradilan agama adalah dengan menerapkan mekanisme fasakh.

ABSTRACT

Syaiful Annas. NIM. 21.0311.020086. *Legal Reformulation for Disparity in Religious Court Divorce Decisions Due to Conversion of Religion of One Party*, under the guidance of Promoter: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzy, M.Hum. and Co-Promoter: Dr. Gusti Muzainah, S.H., M.H., Dissertation, at the Postgraduate Program of Antasari State Islamic University Banjarmasin. 2025.

Keywords: *Religious Conversion (Apostasy), Disparity, Legal Reformulation*

As an embodiment of Islamic justice, religious courts reflect Islamic law (fiqh) in their decisions and make it a reference for legal considerations. The different opinions of fiqh scholars regarding the application of divorce mechanisms due to the conversion of one of the parties has implications for the differences in religious court decisions in Indonesia. Although there are similarities in legal substance, these disparities indicate the absence of legal unification, which means that these decisions do not guarantee the achievement of legal objectives. This study aims to analyze the legal considerations of disparate religious court decisions and propose a more appropriate law for implementing divorce mechanisms in cases involving religious conversion (apostasy).

This research is a normative legal research, using statutory, case, and philosophical approaches. Primary legal materials are laws and regulations and religious court decisions. Secondary legal materials are literature (print and electronic). Tertiary legal materials in the form of legal dictionaries. With qualitative normative analysis method and content analysis.

This research found that legal reasoning in religious court divorce decisions due to a change in one of the parties' religions has not reflected unification or legal certainty, implying disparity in decisions for four reasons: *first*, the disharmonisation of norms in KHI; *second*, the lack of information in the technical manual for religious court officials (book II); *third*, disagreement with higher decisions; and *fourth*, differences in judges in using legal references (fiqh).

When implementing divorce mechanisms, religious courts in Indonesia must consider and adapt to the legal needs of today's society. Based on this, it is necessary to reformulate the law on the disparity in religious court divorce decisions due to the religious conversion of one of the spouses. This reform should be based on unification and legal certainty, in accordance with philosophical validity. This validity emphasizes the importance of a marriage based on one religion (akidah), in order to fulfill the purpose of marriage as stipulated in the Qur'an, the Hadith, and the opinion of the majority of scholars. This is because religion is a matter of principle. When there are differences in religion, marriage is dissolved, and the state is present through religious court decisions. Juridical validity, which shows how the law in Indonesia determines the validity of marriage according to their respective religions and beliefs as stipulated in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law so that these provisions substantially regulate the prohibition of marriages of different religions, this is also synergistic with Islamic marriage law requires the existence of religious equality. Sociological validity: the state desires stability in society, both

in individual, social, and state life, through interfaith marriage, because in truth no religion permits interfaith marriage. and finally, religious validity, where the principle of interfaith marriage is a form of worship and obedience to religious teachings, because marriage involves elements of reward and sin, as the marriage contract is a religious contract (aqdun diniyyun), therefore marriage makes what was previously forbidden permissible. Therefore, based on the aforementioned validities, to ensure legal certainty, the provisions of Article 116 (h) of the Compilation of Islamic Law must be revised, and a more appropriate reformulation of the law based on unification and legal certainty in the application of divorce mechanisms due to the conversion of one party to another religion for religious court decisions is to apply the fasakh mechanism.

مستخلص البحث

سيفل الناس. رقم تسجيل الطالب. 21.0311.020086 عادة الصياغة القانونية للتفاوت في أحكام الفراق في المحاكم الشرعية بسبب المرتد لأحد الطرفين (الزوجين)، تحت إشراف المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج محمد فهم الامروزي الماجستير في العلوم الإنسانية، والمشرف الثاني: الدكتورة الحاجة غستي مزينة، الماجستير في القانون، في قسم الدراسات العليا بجامعة أنتاساري الإسلامية الحكومية بنجارماسين، 2025.

الكلمات الرئيسية: التحول الديني، الاختلاف، وإعادة الصياغة القانونية

باعتبارها تجسيداً للعدالة الإسلامية، تعكس المحاكم الدينية الشريعة الإسلامية (الفقه) في قراراتها وتجعلها مرجعاً للاعتبارات القانونية. إن اختلاف آراء فقهاء الفقه فيما يتعلق بتطبيق آليات التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق أحد الطرفين الإسلام له آثار على الاختلافات في قرارات المحاكم الشرعية في إندونيسيا. وعلى الرغم من وجود تشابهات في الجوهر القانوني، إلا أن هذه التباينات تشير إلى غياب التوحيد القانوني، مما يعني أن هذه القرارات لا تضمن تحقيق المقاصد الشرعية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاعتبارات القانونية لقرارات المحاكم الشرعية المتباينة واقتراح قانون أكثر ملاءمة لتنفيذ آليات التفريق في القضايا التي تنطوي على المرتد.

كان هذا البحث بحثاً قانونياً معيارياً يستخدم منهجاً قانونياً قضائياً فلسفياً. فالمواد القانونية الأولية هي القوانين واللوائح وقرارات المحاكم الشرعية. واما المواد القانونية الثانوية تتمثل في شكل مؤلفات (مطبوعة وإلكترونية). و اما المواد القانونية الزائدة المكملة لهما تتكون من القواميس القانونية مع أساليب التحليل المعياري النوعي وتحليل المضمون.

وتوصل هذا البحث إلى أن الاعتبارات الشرعية في أحكام التفريق بين الزوجين في المحاكم الشرعية بسبب المرتد لأحد الطرفين لا تعكس بعد التوحيد أو اليقين الشرعي، مما يترتب عليه تفاوت الأحكام بسبب أربعة أمور، أولها: عدم انسجام القواعد في مدونة أحكام الشريعة الإسلامية؛ وثانيها: نقص المعلومات في الكتاب الفني لأجهزة المحاكم الشرعية (الكتاب الثاني)؛ وثالثها: عدم توافق الأحكام الشرعية مع الأحكام العليا؛ ورابعها: اختلاف القضاة في استخدام المراجع الشرعية (الفقه). عند تطبيق آلية التفريق بين الزوجين، يجب على المحاكم الشرعية في إندونيسيا الانتباه والتكيف مع الاحتياجات القانونية الحالية للمجتمع. وبناءً على ذلك فإنه من الضروري إعادة صياغة القانون الخاص باختلاف أحكام التفريق الصادرة عن المحاكم الشرعية بسبب المرتد لأحد الطرفين على أساس

التوحيد واليقين القانوني وفقاً وفقاً للصحة الفلسفية التي تؤكد على أهمية الزواج من دين واحد (العقيدة) من أجل تحقيق مقصد الزواج كما نص عليه القرآن والحديث ورأي جمهور العلماء، لأن الدين هو الأصل. ومع اختلاف الدين يفسخ النكاح، ويثبت مع اختلاف الدين ما هو ثابت في الشريعة الإسلامية من أحكام، وهو ما يسمى بالولاية الشرعية؛ الصحة القانونية، والتي تبين كيف أن القانون في إندونيسيا يحدد صحة الزواج حسب ديانة كل منهما ومعتقدهما كما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (2) من قانون الزواج، بحيث تنظم هذه الأحكام بشكل جوهري حظر الزواج من ديانات مختلفة، وهذا أيضاً متأزر مع ما تقتضيه شريعة الزواج الإسلامية من وجود المساواة الدينية. لصحة الاجتماعية، حيث تريد الدولة استقرار حياة المجتمع في جميع جوانبها الفردية والاجتماعية والوطنية من خلال الزواج بين أتباع نفس الدين، لأن في الحقيقة لا يوجد دين يسمح بالزواج بين أتباع أديان مختلفة؛ وأخيراً الصلاحية العبادية، حيث يُعد مبدأ إجراء الزواج بين أتباع نفس الدين شكلاً من أشكال العبادة والطاعة لتعاليم الدين، لأن الزواج ينطوي على عنصر الثواب والذنب، حيث أن عقد الزواج هو عقد ديني (عقد ديني)، وبالتالي فإن الزواج يجعل ما كان محرماً في السابق حلالاً. لذلك، استناداً إلى بعض الصلاحيات المذكورة، ولضمان اليقين القانوني، يجب مراجعة أحكام المادة 116 حرف ح من تجميع قوانين الإسلام، وإعادة صياغة القانون بشكل أكثر دقة على أساس التوحيد واليقين القانوني في تطبيق آلية الطلاق بسبب المرتد لأحد الطرفين بالنسبة لأحكام المحاكم الدينية، وذلك من خلال آلية الفسخ.